

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK**
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional / BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MUHAMMAD HAFID ADHI NUGRAHA
C100110001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**

(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Yang ditulis oleh:

MUHAMMAD HAFID ADHI NUGRAHA

C 100 110 001

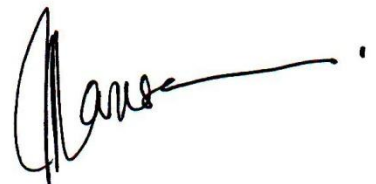
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing I



(Mutimatum Ni'ami. SH..M.Hum)

Pembimbing II



(Marisa Kurnianingsih., SH.MKn.MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**

(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Yang ditulis oleh:
MUHAMMAD HAFID ADHI NUGRAHA
C100 110 001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 7 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua	: Mutimatum Ni'ami. SH..M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Marisa Kurnianingsih., SH.MKn.MH	(.....)
Anggota	: Darsono, SH., M.Hum	(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya

Surakart, 7 Mei 2016

Penulis



MUHAMMAD HAFID ADHI NUGRAHA
C 100 110 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten
Karanganyar)**

Muhammad Hafid Adhi Nugraha
C.100.110.001
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Muhammadhafid001@gmail.com

ABSTRAK

Zakat dan pajak merupakan suatu subsistem yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Dalam Islam zakat merupakan unsur penting serta wajib di laksanakan karena terdapat di dalam rukun Islam keempat. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu elemen penting yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin membayar zakat dan penghasilan kena pajak yang bertujuan membantu pemerintah Kabupaten Karanganya dalam mensejahterakan warganya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan terdapat mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Mekanisme Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

ABSTRACT

Zakat and tax is a subsystem that is very important in supporting the national economy . In Islam zakat is an important element and must be implemented as contained in the fourth pillar of Islam .

While taxes are the obligations imposed on the taxpayer , which must be paid to the State in accordance with the provisions. Management of zakat as a deduction from taxable income in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karanganyar be one important element that is capable of being a forum for people who want to pay the zakat and taxable income that aims to help governments Karanganya district in the welfare of its citizens . Based on Government Regulation No.60 of 2010 on Zakat For Income Reduction mechanism on charity as a deduction from taxable income.

Keywords : Management of Zakat , Zakat Deduction Mechanism Taxable Income

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan pembelanjanya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab dan *hawl* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.¹

Terdapat persamaan manfaat zakat dengan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan patikelir kesektor) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)²

Di Indonesia telah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dan juga untuk menukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi mengelolah hasil zakat yang telah di kumpulkan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dan LAZ juga di bentuk di tiap-tiap

¹ Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 2.

² Rahmat Soemitro, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Yogyakarta: liberty, hlm. 57.

Kabupaten/Kota guna membantu pengumpulan, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat diundangkan, terdapat kendala pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat yang telah di bayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat di kurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan dan zakat bukan merupakan obyek pajak bagi si penerima zakat.

RUMUSAN MASALAH

Pertama, melihat bagaimana latar belakang, maka zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar?

Kedua, selain pembahasan mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar, penulis juga membuat rumusan masalah yang kedua yaitu mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten

Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang pertama yaitu Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian yang dilakukan penulis ini juga memiliki tujuan yang kedua yaitu Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pertama, Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.³ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Kedua, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dianggap dapat memberikan data secara maksimal dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena di daerah ini memiliki

³ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 20.

jumlah obyek penelitian yang cukup; *kedua*, karena di daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta daya beli masyarakatnya yang cukup tinggi.

Ketiga, Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena bersifat “melukiskan” ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat “menjelajah”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang masalah zakat. Hal ini dapat kita lihat di Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 4 dan 3 huruf a no.1 disebutkan “*yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak*”, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan N0.254/PMK03/2010 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*sumbagan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama islam oleh wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh*

⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

pemerintah”. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak dipungut pajaknya.

Adapun Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) adalah: (1) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan mendapatkan bukti setor zakat dan bukti setor zakat diperoleh setelah wajib pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (3) Apabila wajib pajak ingin zakat yang dibayarkan mengurangi PKP, maka: (a) Pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. (b) Bukti setoran zakat lembar 1 diserahkan sebagai lampiran SPT Tahunan. (c) Apabila ada kelebihan bayar pada SPT Tahunan akibat pembayaran zakat maka zakat yang telah dibayar akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Wajib Pajak dapat membayarkan zakatnya dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian membayarkan zakat kepada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat baik secara tunai untuk perseorangan maupun secara non tunai untuk Badan Hukum. Pembayaran zakat kepada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat akan mendapatkan bukti setoran zakat, apabila zakat digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak maka diwajibkan untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kolom bukti setoran zakat. Dan untuk menjaga keamanan bukti setoran zakat dilaporkan kepada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh ada dua macam, Surat Pemberitahuan

Tahunan PPh Orang Pribadi (Form 1770) dan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Hukum (Form 1771).

Dalam pelaksanaannya, terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

- (1) Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- (2) Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (3) Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada dasarnya zakat merupakan institusi yang bersumber dari syariat Islam. Sedangkan pajak merupakan institusi yang bersumber dari teori dan praktek dalam pengelolaan Negara. Dalam Negara yang tidak berideologi pada agama (Islam), biasanya isntitusi pajak lebih mapan berdasarkan Undang-Undang. Karena Indonesia bukan Negara Islam institusional lembaga pajak penghasilan jauh lebih maju dibandingkan dengan zakat penghasilan lembaga pajak penghasilan. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat maka kini kedua institusi tersebut telah berdiri relative sejajar sebagai lembaga yang dikelola oleh Negara. Namun, karena peraturan

tersebut masih baru maka pemberdayaan dan pengelolaan institusi zakat oleh Negara masih memerlukan reposisi yang membutuhkan waktu.

Dalam menentukan apakah zakat dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak itu tergantung pada sistem yang dianut oleh suatu Negara yang ditetapkan dalam peraturan yang telah ada. Sedangkan di Indonesia dengan Undang-Undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat penghasilan sebagai instrument penggalangan dana publik bagi keperluan Negara disamping instrument pajak penghasilan yang telah ada lebih dahulu.

Sebagai sebuah proses atas reposisi institusi zakat penghasilan dimasa-masa mendatang, maka keberadaan Undang-Undang tersebut sudah memadai. Disatu sisi kadang-kadang zakat penghasilan yang sebelumnya dilakukan oleh individu-individu masyarakat menuju pengelolaan yang lebih professional dibawah institusi Negara melalui lembaga pemerintah.

Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam tingkatanya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut:

- (1) Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- (2) Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (3) Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen

Agama Kabupaten atau Kota. (4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam pembukaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dasar-dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
2. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.
4. Bahwa upaya penyempurnaan system pengelolaan zakat perluterus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Beberapa pertimbangan diatas merupakan dasar dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat akan semakin efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar kaum muslimin di Indonesia yang telah membayar zakat tidak kena beban ganda. Di samping ia harus membayar zakat, ia memiliki kewajiban Negara dengan membayar pajak. Dengan ada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat upaya dapat memperkecil beban berganda yang telah ditanggung umat muslim di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1)

⁵A Rahman Zaenudin, 2000, *Berbagi Pandangan Tentang Zakat*, Jakarta: Paramadina, hlm. 17

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *“pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat”*.⁶

Untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar memiliki program kerja yang telah di buat tiap tahunnya agar kegiatan yang di lakukan dapat berjalan dengan semestinya dan mampu berjalan secara maksimal, program kerja tersebut secara garis besar terdiri dari pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah serta pendayagunaan dan pendistribusian dari hasil dana yang telah terkumpul. Setelah melakukan tahapan proses pengumpulan, dana zakat kemudian di kelola oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar dengan professional dan dengan pengawasan yang ketat. Sebelum dana di distribusikan, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar sebelumnya telah membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Hal itu dimaksudkan agar dana yang keluar benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, serta agar mampu mempermudah pengurus dalam mendistribusikannya. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar terkelola secara sistematis dan struktural. Dana zakat yang sudah terkumpul pada Bidang Pengumpulan akan langsung dialokasikan kepada 3 bidang yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Karanganyar, yang nantinya akan di kelola sesuai dengan fungsi dari masing-masing bidangnya. Terdapat tiga bidang yang mempunyai tugas mengelola dana Zakat yaitu, Bidang Pendayagunaan, Bidang Pendistribusian dan Bidang Pengembangan. Dalam hal ini fungsi dan tugas pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Zakat, terdapat pihak yang turut serta dalam mengelola zakat. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat *“untuk melaksanakan pengelolaan zakat Pemerintah membentuk BAZNAS”*. Organisasi ini bergerak di bidang pengelolaan Zakat, Infaq maupun Sedekah. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimana pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat.

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lain-lainnya. Namun amat besar pula hikmah yang di peroleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan

agar dapat mensucikan hati siwajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak bawaan manusia.⁷

Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة 277)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS. Al Baqarah: 277)

Nabibersabda

إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه بخاري)

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka.” (HR. Bukhari)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه مسلم و بخاري)

“saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah dan mereka mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah.”

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, hal. 11

menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar adalah: (1) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan mendapatkan bukti setor zakat. (3) Apabila wajib pajak ingin zakat yang dibayarkan mengurangi PKP, maka: (a) Pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. (b) Bukti setoran zakat lembar 1 diserahkan sebagai lampiran SPT Tahunan. (c) Untuk wajib pajak perorangan dapat membayarkan zakatnya secara tunai, dan untuk wajib pajak badan dapat secara non tunai.

Kedua, Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas dari bidang. Bidang tersebut adalah: (1) Bidang pengumpulan, bertugas mengumpulkan zakat. (2) Bidang pendayagunaan, bertugas menggunakan zakat sesuai fungsinya. (3) Bidang pendistribusian, bertugas menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. (4) Bidang pengembangan, bertugas untuk mengembangkan potensi SDM atau non SDM di daerah Kabupaten Karanganyar.

Saran

Pertama, Perlu ditingkatkannya sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sekaligus kebijakan mengenai adanya Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan kepada Masyarakat baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar ataupun pemerintah.

Kedua, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

Ketiga, Bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar ataupun terhadap pekerja warga Kabupaten Karanganyar agar lebih pahamakan pentingnya membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Ashshofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djuanda, Gusti. 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Hadikusuma, Hilman. 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad. 2002, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Soemitro, Rahmat. 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Yogyakarta: liberty.
- Zaenudin, ARahman, 2000, *Berbagi Pandangan Tentang Zakat*, Jakarta: Paramadina,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto